VERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

#### DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib, 2014, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, PT Citra Aditya, Bandung.
- \_, 2015, Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris dan PPAT), Indonesia Notary Community (INC), Yogyakarta.
- AL Rashid, Harun, 1986, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (berikut Peraturan-Peraturannya), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bachiadi, Rianto, et, al, eds, 1997, Perubahan Politik dan Agenda Perbaharuan Agraria Di Indonesia, FE UI, Jakarta.
- Chulaemi, Achmad, 1992, Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP).
- Effendi, Bachtiar, 1998, Kumpulan Tulisan Tentang Hak Tanah, Alumni, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gandawidjaja, Yanly, 2002, Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Herwiningsih, Winahyu, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media dan FH UII, Yogyakarta.
- Mustofa, 2010, Tuntuan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Karya Media, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwardaminta, 1987, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Saputra, Rendy, 2016, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- - Setiabudi, Jayadi, 2015, Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya, Penerbit Buku Pintar, Yogyakarta.
  - Situmorang, Victor M. dan Cormetnya Sitaggang, 1993, Grose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Reika Cipta, Jakarta.
  - Soegondo, Notodisoerjo R., 1993, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
  - Soeroso, R., 2010, Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Akta dan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Suardi, 2005, Hukum Agraria, Badan Penertbit IBLM, Jakarta

Subekti, 1993, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.

Suryabrata, Sumadi, 1988, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta.

Tehupeiory, Aartje, 2012, Pentingnya Pendaftaran Di Indonesia, Cetakan I, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pokok Perbankan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

#### HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN DRAF AKTA JUAL BELI TANAH DAN SURAT PENYERAHAN JAMINAN SECARA SUKARELA

JAMINAN SECARA SUKARELA (Studi Kasus pada Koperasi Buana Jaya di Kabupaten Parigi Moutong) K.R MUDITA, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pembuat Akta Tanah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Kode Etik Pejebat Pembuat Akta Tanah.

## Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah

- Anindhita Prameswari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akta PPAT Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur (Studi Kasus Akta Jual Beli Tanggal 14 Maret 2012 Nomor 07/2012 Yang Dibuat Dihadapan PPAT TH Dengan Wilayah Kerja di Kotamadya Jakarta Selatan)", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2013.
- Didik Ariyanto, "Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Gobrongan", Tesis. PPS Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Niluh Oka Kartika, " Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemidahan Hak Atas Tanah", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017.
- Satria Tegar Pribadi, "Penyimpangan Pembuatan Akta Kuasa Menjual oleh Notaris dalam Praktek Pembebanan Hak Tanggungan di Kota Yogyakarta", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Soemardjono, Maria S. W., 1993, Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Majalah Mimbar Hukum, Nomor 18/X/93, Tahun 1993.

# **Internet**

R.A. Granita Ramadhani, "Bab 3 Metodologi Penelitian Hukum", diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file%20=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodolo%20gi.pdf, pada tanggal 10 November 2018, pukul 22.08 WIB.



Dodik Dwiwanto, "Apa yang Dimaksud dengan Akta Jual Beli (AJB), diakses dari https:// artikel.rumah123.com/apa-sih-yang-dimaksud-dengan-akta-jual-beli-ajb-47504, pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 19.20 WIB.